

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

Upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme terus dilakukan oleh pemerintah Indonesia, termasuk salah satunya melakukan kerjasama internasional. Dalam konteks kerjasama internasional, isu ini menjadi penting karena kejahatan terorisme yang tidak hanya terjadi di satu negara tapi dapat dikatakan sebagai kejahatan transnasional yang terjadi di beberapa negara sehingga upaya menjalin kerjasama dengan entitas resmi dibawah UN adalah langkah baik. Kerjasama internasional dalam bidang keamanan khususnya, tentunya akan sangat memperkaya informasi suatu negara ketika negara tersebut menjalin banyak kerjasama, baik dengan sesama negara ataupun organisasi internasional, CSO dan lainnya.

UNODC selaku organisasi internasional merupakan entitas resmi dibawah PBB yang menjadi salah satu organisasi internasional ikut serta menangani permasalahan terorisme. Karena kebutuhan akan kerjasama penanganan terorisme di tingkat global, UNODC menjalin kerjasama dengan lembaga nasional suatu negara untuk penanganan ditingkat domestic negara tersebut, yang dalam hal ini adalah BNPT mewakili pemerintah Indonesia.

Merujuk pada peran UNODC sebagai organisasi internasional, UNODC berperan sebagai instrumen bagi pemerintah Indonesia, dimana hal ini terlihat dari upaya pemerintah Indonesia untuk mewujudkan keamanan dan perdamaian dunia yang dalam hal ini adalah mengenai ancaman yang ditimbulkan oleh kejahatan terorisme—sebagai tujuannya. Selain itu, UNODC selaku organisasi internasional berperan sebagai arena, hal ini terlihat dari salah satu mandat UNODC adalah mendukung negara untuk memperkuat kerjasama di tingkat regional dan internasional, maka hal ini akan membuka kerjasama antar negara untuk membahas mengenai penanganan permasalahan terorisme di tingkat global, dimana pada akhirnya dapat berkontribusi pada pelaksanaan penanganan masalah terorisme di tingkat nasional Indonesia. Lebih jauh, sebagai aktor independen tentunya UNODC

juga memiliki wewenang untuk membuat keputusannya sendiri, hal ini dapat terlihat melalui kebijakan-kebijakan UNODC yang diturunkan pada programnya, namun demikian UNODC tidak menutup saran dan masukan dari berbagai negara terkait hal tersebut.

BNPT selaku lembaga resmi pemerintah Indonesia yang menjadi leading sektor dalam menangani permasalahan terorisme ini tentu akan membutuhkan kerjasama dengan pihak lain, utamanya dengan pihak-pihak yang memiliki keselarasan tujuan dengan BNPT, dan oleh sebab itu maka BNPT menjalin kerjasama dengan UNODC. Kedua lembaga saling memberikan manfaat, hal ini terlihat pada upaya dukungan dari UNODC kepada BNPT melalui capacity building ataupun pelibatan-pelibatan BNPT dalam agenda dan kegiatan yang dilakukan oleh UNODC. BNPT pun juga memberikan dukungan kepada UNODC, salah satu bentuk nyatanya adalah pemerintah Indonesia melalui BNPT mengeluarkan deklarasi politik "*Bali Call For Action*" dalam upaya mengimplementasikan UNODC *Roadmap* mengenai Program Global untuk mengakhiri kekerasan terhadap anak-anak (*Global Programme to End Violence Against Children/END VAC*). Hal tersebut menunjukkan keselarasan dengan tujuan BNPT yang saat ini juga aktif mengupayakan penanganan anak-anak di Indonesia yang terlibat dengan ekstremisme kekerasan dan kejahatan terorisme tersebut.

Mengenai upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme di tingkat nasional, diperlukan tindakan yang lebih lanjut. Terutama mengenai persoalan yang timbul akibat keterlibatan perempuan dan anak dalam kejahatan terorisme ini. Kementerian/Lembaga yang terlibat dalam penanganan isu ini diharapkan dapat menjalin sinergitas sehingga implementasinya pun dapat berjalan secara maksimal. Penanganan permasalahan perempuan dan anak dalam kejahatan terorisme jika dilihat dari sudut pandang regulasi atau hukum yang mengaturnya, belum ada yang membahas secara khusus meskipun sudah ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dan UU No. 5 tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Utamanya mengenai regulasi untuk anak yang terlibat tindak pidana karena anak merupakan generasi penerus masa depan.

## 6.2 Saran

Dalam upaya pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan kejahatan terorisme terutama di Indonesia, pemerintah, stakeholder terkait dan semua elemen masyarakat harus turut ikut serta dalam melakukannya. Karena setiap pihak memiliki peran dan fungsi masing-masing. Terkait dengan perempuan dan anak yang terlibat dalam kejahatan terorisme harusnya ada regulasi khusus mengatur hal tersebut secara detail, khususnya terkait dengan anak karena jika seorang anak terlibat dalam kejahatan terorisme anak tersebut tidak dapat dikatakan sebagai pelaku, namun anak tersebut disebut sebagai korban.

Bagi peneliti yang tertarik untuk membahas kerjasama antara BNPT dan UNODC dalam menangani permasalahan terorisme, dapat melihat pada perodesasi tahun berikutnya dan dapat mengangkat satu isu yang juga fokus pada satu program kerjasama yang ada, seperti terkait dengan penanganan anak yang terlibat dengan kejahatan terorisme ini dapat melihat kepada program Strive Juvenile. Selain itu, peneliti berikutnya juga dapat menganalisis lebih jauh keberhasilan GUYUB Project melalui masing-masing lembaga (UNODC, UNDP, UN Women) di periode tahun berikutnya hingga berakhirnya proyek tersebut pada pertengahan 2022.